

**KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT  
POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)**

Sabrina Helawati,      Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.S,      Dr. Ismail  
Navianto, S.H. M.H.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email : [sabrinahelamoy@gmail.com](mailto:sabrinahelamoy@gmail.com)**

**Abstrak**

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan batuan yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang menjadi masalah di sini yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin atau pun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (*illegal mining*) ini wajib dilakukan demi tercapainya supremasi hukum. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu warga setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh *illegal mining* tersebut. Tetapi, pihak Kepolisian Resort Mojokerto menghadapi beberapa kendala pada saat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin tersebut.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, pertambangan batuan tanpa izin.

## **Abstract**

Each region in Indonesia has the own potential. Mojokerto regency is one of region that has the potential for a sizeable rock mining with good quality, but can not be fully utilized. The legal problem here is when the mining is done is illegal mining or legal mining. Therefore, the enforcement of the law against the crime (illegal mining) must be done in order to achieve the rule of law. Because, if allowed to continue, it is possible to interfere with local residents due to the environmental impact caused by the illegal mining. However, the Police of Resort Mojokerto face several obstacles when enforcing the law against illegal mining.

Keywords: law enforcement, criminal acts, rock mining without permission.

### **A. Pendahuluan**

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.<sup>1</sup>

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>2</sup>

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Dalam hal ini Salim HS, mengartikan:

“Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.<sup>3</sup>

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan batuan yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahannya yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin atau pun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Keberadaannya hampir menyebar diseluruh Kecamatan yaitu Kecamatan Ngoro, Gondang, Pungging, Pacet, Bangsal, Jatilejo, Dawarblandong, dan Puri.<sup>4</sup>

Adapun kasus pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto terjadi di kawasan Dlanggu yang menyebabkan sawah longsor akibat penambangan batuan yang terus dilakukan. Penggalan tanah sawah itu melebihi kedalaman dari yang semestinya, dan sangat membahayakan. Hingga kepala desa Sumber Karang, Dlanggu mengambil kebijakan dengan menutup proyek pertambangan batuan ini.<sup>5</sup>

Menurut data hasil pra survey yang diambil penulis dari Kepolisian Resort Mojokerto, data pertambangan batuan tanpa izin yang sudah diproses hukum pada tahun 2010 mencapai 9 (Sembilan) kasus dan pada tahun 2011 ada sejumlah 7

---

<sup>3</sup> Salim H.S., **Hukum Pertambangan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8.

<sup>4</sup> Data hasil pra survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

<sup>5</sup> Wahyudiono, 2013, **Galian C Illegal Penyebab Sawah Dusun Ketapan Longsor** (online), <http://suara-publik.com/berita-959-galian-c-illegal-penyebab-sawah-dusun-ketapan-longsor-.html>, (25 Agustus 2013, pukul 10. 00 WIB.)

(tujuh) kasus. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Mojokerto mengatakan tidak menangani kasus pertambangan ilegal, sebab adanya moratorium yang berupa Surat Edaran dari Kementerian ESDM yang masih berlaku di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto.<sup>6</sup>

Di Kabupaten Mojokerto, kita dapat menyaksikan dampak dari pertambangan tanpa izin yaitu dengan timbulnya tanah longsor, amblas, banjir, tanah tidak subur lagi, sungai menjadi kering sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (*illegal mining*) ini wajib dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu warga setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh *illegal mining* tersebut.

## **B. Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ?

## **C. Pembahasan**

### **C.1 Metode Penelitian**

Peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris, dengan alasan hendak mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada mengenai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, khususnya pada penyidikan yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Data hasil pra survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto , pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

oleh Kepolisian Resort Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Resort Mojokerto Jalan Gajah Mada No. 99 Mojosari Mojokerto, karena mencakup 11 (sebelas) kecamatan yang mana 11 (sebelas) kecamatan tersebut merupakan kawasan yang berpotensi menjadi wilayah pertambangan batuan tanpa izin dan menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan<sup>8</sup>, tentang bagaimana kendala yang dihadapi aparat Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin serta upaya penegakan hukumnya. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional, yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegakannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 34

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, **Penegakan Hukum** (online), [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hlm. 1-2, (25 Agustus 2013, pukul 19.00 WIB.)

b. Tindak pidana pertambangan

Merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Pertambangan tanpa izin

Yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan tambang tanpa memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat daerah setempat yang berwenang.

d. Pertambangan batuan

Pertambangan batuan ini sering dilakukan oleh masyarakat warga Kabupaten Mojokerto, yaitu bahan tambang pasir dan batu.

e. Penyidik

Penyidik dalam penelitian ini yaitu anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto yang diberi kewenangan sesuai Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## C.2 Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Mojokerto

Kepolisian Resort Mojokerto terletak di Jalan Gajah Mada No. 99 Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya utama yang menghubungkan jalur antar kota. Bangunan Kantor Kepolisian Resort Mojokerto ini juga tergolong baru yang bertempat di Mojosari, Kabupaten Mojokerto dan baru berdiri sekitar tahun 2006/2007 karena Kantor Kepolisian Resort Mojokerto yang lama digunakan untuk Kantor Kepolisian Resort Mojokerto Kota.

Dahulu, wilayah hukum Kepolisian Resort Mojokerto berjumlah 18 (delapan belas) sektor, namun saat ini Kepolisian Resort Mojokerto membawahi 11 (sebelas) sektor, sedangkan 7 (tujuh) sektor dilimpahkan kepada Kepolisian Resort Mojokerto Kota sebab beban kerja berat dirasakan oleh Kepolisian Resort Mojokerto.

Saat ini Kepolisian Resort Mojokerto membawahi 11 (sebelas) sektor, antara lain: Polsek Ngoro, Polsek Pungging, Polsek Mojosari, Polsek Bangsal, Polsek Kutorejo, Polsek Pacet, Polsek Trawas, Polsek Dlanggu, Polsek Trowulan, Polsek Gondang, dan Polsek Jatirejo.

## 2. Realita Kasus Pertambangan Batuan Tanpa Izin di Kabupaten Mojokerto

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto mengalami kemajuan, sebab dari 9 (Sembilan) kasus pertambangan tanpa izin di tahun 2010 menyusut menjadi 7 (tujuh) kasus di tahun 2011.<sup>10</sup> Namun hal ini bukan berarti sudah tidak ada kasus pertambangan batuan tanpa izin lagi, kegiatan penambangan masih marak di berbagai kawasan di Kabupaten Mojokerto. Tetapi pihak Kepolisian Resort Mojokerto hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian Resort Mojokerto tidak bergerak untuk menanganinya.<sup>11</sup>

Kabupaten Mojokerto terkenal dengan potensi komoditas tambangnya yang melimpah, yaitu pertambangan bahan tambang batuan atau lebih dikenal dengan pasir dan batu (sirtu). Di Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2012 ada sebanyak 36 lokasi pertambangan batuan sirtu, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 47 lokasi

---

<sup>10</sup> Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

pertambangan.<sup>12</sup> Selain di dekat sungai, penambangan batuan juga kerap kali dilakukan di daratan lereng gunung, seperti di Kecamatan Ngoro.

Menurut data dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, ada sebanyak 30 usaha pertambangan batuan dari total 43 pertambangan batuan di Kabupaten Mojokerto pada Bulan Maret 2012 sudah habis masa izinnnya. Evaluasi dilakukan pada semua perizinan pertambangan batuan terutama proses reklamasi. Proses reklamasi merupakan syarat wajib yang harus dimiliki pengusaha penambangan batuan untuk memperpanjang izin usahanya. Sejumlah 30 usaha pertambangan batuan yang masa izin masih ada, sisanya masih dalam tahan proses reklamasi. Jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka izin usaha pertambangan batuan tersebut tidak bisa dikeluarkan. Sedangkan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Mojokerto yang masih berlaku ada sebanyak 13 pertambangan (tahun 2010-2012). Data Izin Pertambangan Rakyat (IPR), BPTPM mencatat sebanyak 4 perusahaan tambang yang izinnnya masih berlaku (tahun 2010-2012).<sup>13</sup>

Menurut Yoko Priyono, Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), sejak bulan Maret tahun 2012, pihaknya tak lagi mengeluarkan ijin baru. Karena sesuai Surat Edaran dari Kementerian ESDM, semua Bupati, Walikota dan gubernur, tidak boleh mengeluarkan ijin usaha tambang, Surat Edaran ini diterima bulan Maret tahun 2012 kemarin. Sejak adanya Surat Edaran itu, BPTPM tidak mengeluarkan ijin usaha pertambangan batuan, meski banyak pengusaha yang mengajukan ijin ke BPTPM. Termasuk ijin yang sudah habis, tidak akan diperpanjang. Namun, kata Beliau, masih akan konsultasi ke Kementerian ESDM, untuk memperjelas Surat Edaran ini.

---

<sup>12</sup> Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 23 September 2013, pukul 09.30 WIB.

<sup>13</sup>Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 27-28 Agustus 2013, pukul 10.00 WIB.



Sebab tidak ada penjelasan secara detail usaha tambang jenis apa saja yang ijinnya tak lagi dibolehkan.<sup>14</sup>

Kasus pertambangan batuan tanpa izin akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Sebab banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Pihak kepolisian juga tidak menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat, karena hal itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Sesungguhnya hanya sisi kemanusiaan saja yang dilakukan terhadap penambang liar.<sup>15</sup>

Itulah realitanya hingga saat ini. Masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tiada ijinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Pengetahuan masyarakat tentang alam lingkungan sangat lemah. Lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, kini dirusak dengan sadarnya dan memanfaatkan secara tidak imbang. Ketika lingkungan tidak setabil maka tidak bisa di pungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain.

### 3. Kendala Penegakan Hukum yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin

Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kepolisian Resort Mojokerto yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, diantaranya adalah :

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yoko Priono selaku Kepala BPTPM dan Ibu Ida pada bagian TU BPTBPM Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 27-28 Agustus 2013, pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

- a. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu Di kantor Kepolisian Resort Mojokerto

Dalam hal ini, kuantitas yang dimaksud adalah jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resort Mojokerto terdapat 7 (tujuh) orang anggota penyidik dan tidak seimbang dengan kasus pertambangan batuan tanpa izin yang terjadi di 36 lokasi pada tahun 2012 dan terjadi di 47 lokasi pada tahun 2013 yang semakin meluas. Kualitas anggota penyidik kantor Kepolisian Resort Mojokerto belum memadai, artinya belum ada personil penyidik atau anggota polisi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyidik yang berkompeten dalam hal menangani kasus kejahatan lingkungan hidup, khususnya di bidang pertambangan tentang kasus pertambangan tanpa izin karena untuk mengetahui tentang unsur-unsur kejahatan lingkungan hidup khususnya tindak pidana pertambangan ilegal ini pihak penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (tipiter) Kepolisian Resort Mojokerto memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).<sup>16</sup> Kuantitas dan kualitas personil penyidik dalam di unit tindak pidana tertentu (tipiter) yang belum memadai tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan batuan tanpa izin. Meskipun pihak penyidik memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), tetapi apabila penyidiknya sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang lingkungan hidup juga akan berdampak pada penentuan pemidanaan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan batuan itu.

- b. Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto yang tidak efektif

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muharto selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 27 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB.

Koordinasi atau hubungan yang kurang baik antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dijalankan, karena dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ini diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Apabila koordinasi ini tidak terjalin dengan baik maka, hal ini bisa menghambat proses penyidikan. Terbukti pada saat unit tindak pidana tertentu Kepolisian Resort Mojokerto melakukan operasi ke wilayah pertambangan di Kabupaten Mojokerto terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas pertambangan dimana orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Para penambang ini mengelak bahwa sudah mengajukan permohonan izin namun BPTPM tidak segera menerbitkan izinnya.<sup>17</sup> Dalam hal ini pelaku penambang dan penegak hukum tidak bisa disalahkan karena faktor yang memperumit adalah pihak BPTPM.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Resort Mojokerto bisa mengklarifikasi langsung kepada pihak BPTPM untuk memastikan tentang surat izin usaha pertambangan tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak Kepolisian Resort Mojokerto tidak bergerak secara langsung untuk menyidik para pelaku penambang yang izinnya belum terbit tersebut. Pihak Kepolisian Resort Mojokerto dan pihak BPTPM ini cenderung bekerja sendiri-sendiri dalam bidangnya tanpa mengingat penegakan hukum yang diharapkan masyarakat.

Kendala eksternal yaitu yaitu kendala yang peneliti temukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pertambangan tanpa izin, diantaranya adalah :

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

a. Ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah

Saksi yang dipanggil oleh penyidik pada tahap penyidikan wajib memenuhi panggilan. Kehadiran saksi-saksi ini sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperjelas berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kantor Kejaksaan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin juga perlu dipanggil dan diperiksa. Namun, di salah satu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) peneliti menemukan bahwa pemilik modal/perusahaan tambang dan sebuah perusahaan yang bisa dipersamakan sebagai penadah tidak turut dipanggil padahal perusahaan tersebut yang membeli batu hasil pertambangan tanpa izin untuk diolah kembali menjadi batu kecil-kecil dan dijual kembali pada kontraktor untuk membangun stadion, perumahan, dan lain sebagainya.

b. Keterangan saksi yang tidak jelas

Saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik dalam tahap penyidikan memberikan keterangan berbelit-belit atau dibuat-buat untuk menyembunyikan identitas pemilik perusahaan tambang sehingga menyebabkan penyidik kesulitan dalam menentukan kronologi perkara, termasuk juga dalam penentuan tersangka, dan siapa saja yang terlibat dalam suatu tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

c. Keterangan saksi ahli tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peneliti melihat bahwa saksi ahli yang dipanggil memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penyidik. Padahal saksi ahli yang dipanggil merupakan saksi yang cukup berkompeten di bidangnya, yaitu terkait dengan tindak pidana pertambangan. Hal ini menyulitkan penyidik dalam memperoleh petunjuk yang akan membuat terang suatu perkara pidana.

4. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resort Mojokerto untuk Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik

Untuk mengatasi masalah kuantitas anggota penyidik, para polisi reserse Sat Opsnal Kepolisian Daerah Jatim saling melakukan kerja sama dengan Kepolisian Resort Mojokerto dan saling merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya, sedangkan untuk menambah kualitas personil dilakukan pelatihan-pelatihan dan diklat. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai pengetahuan tentang kejahatan lingkungan hidup di kantor Kepolisian Resort Mojokerto membuat anggota penyidik tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin selalu mendatangkan saksi ahli dari luar, yaitu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).<sup>18</sup> Namun apabila terdapat SDM yaitu penyidik yang berpotensi tentang kejahatan lingkungan, khususnya di bidang pertambangan, hal ini akan membuat tahap penyidikan menjadi semakin cepat dan akan membuat terang suatu tindak pidana.

Sumber Daya Manusia (SDM) memang merupakan pondasi utama dalam suatu organisasi yang didirikan untuk masyarakat. Dengan SDM yang berkualitas, maka tujuan juga akan tercapai. Di dalam lingkup institusi kepolisian, khususnya penyidik juga sangat diperlukan SDM yang berkualitas dan professional agar masyarakat yang dilayani mendapat keadilan yang selayaknya. Sehingga untuk mewujudkan penyidik yang memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai dibutuhkan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muharto selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 27 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB.

pelatihan-pelatihan terjadwal agar berpotensi dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

2. Menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum.

Adanya stigma yang timbul bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak tegas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum, sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada anggota/institusi Polri semata, namun dipengaruhi pula oleh faktor dari luar, yaitu koordinasi yang lemah dan kurang piawai dengan instansi penegak hukum (penyidik) lainnya. Menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti, pihak Kepolisian Resort Mojokerto dan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto terlihat seperti berjalan sesuai kewenangannya masing-masing tanpa memperhatikan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan bekerja sama secara tegas antar institusi terkait.

Kondisi yang tidak harmonis antara aparat penyidik Kepolisian Resort Mojokerto dengan pihak BPTPM, dapat menyebabkan munculnya persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (khususnya aparat kepolisian). Padahal, peran aparat kepolisian dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan menuju terciptanya supremasi hukum.

Oleh karena kendala dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang seolah-olah memperumit pengeluaran izin usaha pertambangan dari pengusaha tambang,<sup>19</sup> maka pihak Kepolisian Resort Mojokerto selayaknya menyusun strategi guna meningkatkan koordinasi antar instansi penegak

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

hukum demi terwujudnya koordinasi yang sinergis antar aparat kepolisian dengan institusi lain, khususnya dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, sebagai salah satu wujud membangun kemitraan bersama untuk tujuan bersama pula.

Dasar yuridis yang melibatkan insitusi lain untuk melakukan proses penyidikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) KUHP menyatakan penyidik adalah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Keterlibatan institusi lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam melakukan proses penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, seperti kendala sumber daya manusia, masalah kuantitas dan kualitas anggota penyidik, dan sebagainya, sehingga peran institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun, hal ini malah menimbulkan kondisi yang tidak harmonis sehingga terjadi kesalahpahaman antar aparat kepolisian dan pihak BPTPM, serta penanganan kasus pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto pun tak kunjung terselesaikan.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala eksternal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penyampaian Surat Panggilan II

Pasal 112 KUHP menyebutkan :

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan penyebutan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil

tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Pelaksanaan pemanggilan dilakukan sesuai dengan cara penyampaian Surat Panggilan I dan penyampaian Surat Panggilan II. Namun, apabila surat panggilan II tidak diindahkan oleh saksi yang dipanggil, maka penyidik Kepolisian Resort Mojokerto akan menjemput tersangka/saksi dengan menerbitkan Surat Perintah Membawa.<sup>20</sup>

2. Menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi

Berkaitan dengan proses penyidikan, maka keterangan saksi adalah hal utama dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkumpul dalam Berkas Perkara kemudian diserahkan di kantor Kejaksaan. Keterangan saksi dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, penyidik Kepolisian Resort Mojokerto mengingatkan saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit guna membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk yang akan menemukan siapa pelakunya.

3. Menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli

Pasal 120 ayat (1) KUHAP, menyebutkan :

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan.“

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bansor selaku anggota penyidik Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.



Saksi ahli yang dipanggil oleh pihak Kepolisian Resort Mojokerto adalah saksi yang berkompeten di bidangnya dan mempunyai pengetahuan yang sebaik-baiknya terkait tentang tindak pidana pertambangan.<sup>21</sup> Namun, saksi ahli yang dipanggil kurang bisa menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Oleh sebab itulah, penyidik melakukan upaya untuk menjelaskan tentang kewajiban saksi ahli sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) demi kelancaran proses pemeriksaan.

## **D. Penutup**

### **D.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Mojokerto dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang batuan tanpa izin tersebut, yaitu :
  - a. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik di tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, dan
  - b. Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto yang tidak efektif.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Mojokerto dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang batuan tanpa izin tersebut, yaitu :

- a. Ketidakhadiran saksi yang hadir,
- b. keterangan saksi yang tidak jelas, dan
- c. keterangan saksi ahli yang tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muharto selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 27 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB.

2. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam menangani tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di atas, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala internal yaitu :
  - a. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik, dan
  - b. Menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi terkait demi tercapainya penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala eksternal yaitu :

- a. Melakukan Penyampaian Surat Panggilan II
- b. Menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi
- c. Menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli

#### D.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, penertiban, penanggulangan, dan penghentian pertambangan batuan tanpa izin secara total.
2. Perlunya memberikan penyidikan dan pelatihan khususnya kepada penyidik/penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya masalah perizinan di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).
3. Perlunya Satuan Reskrim mengatasi segala kendala yang ada dalam proses penyidikan pertambangan batuan tanpa izin.
4. Pihak kepolisian hendaknya bertindak tegas dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, dan tidak

disarankan untuk menerima dana dari pengusaha tambang agar menutupi usaha tambangnya yang tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Salim H.S., **Hukum Pertambangan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 75*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8.

### **Website :**

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum (online), [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hlm. 1-2, (25 Agustus 2013, pukul 19.00 WIB).

Wahyudiono, 2013, Galian C Illegal Penyebab Sawah Dusun Ketapan Longsor (online), <http://suara-publik.com/berita-959-galian-c-illegal-penyebab-sawah-dusun-ketapan-longsor-.html>, (25 Agustus 2013, pukul 10. 00 WIB).